

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 60  
Desember 2023



# UU ITE

Kepastian Hukum Ruang Digital

# TIM REDAKSI

**Pengarah:**  
Mira Tayyiba

**Pemimpin Redaksi:**  
Rhina Anita

**Wakil Pemimpin Redaksi:**  
Daoni Diani Hutabarat

**Redaktur Pelaksana:**  
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur  
Pelaksana:**  
Viskayanesya

**Redaktur:**  
M. Taufiq Hidayat  
Verawati  
Annisa Bonita P.

**Reporter:**  
Yusuf  
Ahmad Irso Kubangun  
Meita Pusparini  
Desideramus Bitan

**Fotografer:**  
Agus Yudi Harsono  
Doni Paulus Sumule  
Sri Indrati Novinarsari  
Indra Kusuma

**Desain & Layout:**  
Adista Winda Rizka  
Rahma Aulia Indroputri  
Dhenty Febrina Sahara  
Annas Yudistira Saputra

**Produksi:**  
Fahmie Trihatin J.

**Alamat Redaksi:**  
Biro Humas Kementerian  
Komunikasi dan Informatika  
Jl. Medan Merdeka Barat  
No. 9, Jakarta Pusat

## Perubahan Kedua UU ITE, Kabar Baik di Penghujung Tahun

Rekan-rekan pembaca setia KominfoNext yang saya banggakan,

Saya mewakili seluruh tim redaksi mengucapkan selamat merayakan Natal bagi rekan-rekan pembaca yang merayakan, serta selamat menyambut tahun baru 2024 dengan penuh sukacita. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah-langkah kita semua.

KominfoNext edisi ke-60 kali ini mengangkat tentang pengesahan perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai liputan utama.



**Rhina Anita**

Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah resmi disahkan pada 5 Desember 2023 lalu. Pengesahan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, setidaknya ada lima alasan perubahan itu perlu dilakukan, di antaranya perlindungan optimal bagi pengguna internet, termasuk anak-anak. Pengesahan perubahan kedua UU ITE ini diharapkan membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia, karena memberikan kejelasan dalam penggunaan teknologi informasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam ranah digital. Dengan demikian, Anda sebagai pembaca akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam beraktivitas di dunia maya.

Tidak hanya itu, edisi ini juga mengulas tentang Visi Indonesia Digital 2045, sebuah dokumen strategis berisi rekomendasi arah kebijakan dan strategi nasional bidang digital yang sangat penting bagi perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

VID 2045 menggambarkan analisis terhadap identifikasi isu relevan, perkembangan tren teknologi, peluang, serta pertimbangan terhadap dampak ekonomi, sosial, dan budaya dalam penyelenggaraan transformasi digital. Visi ini tidak hanya menjadi panduan bagi pemerintah, tetapi juga untuk seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang semakin maju.

Selain itu, dalam edisi ini kami juga memuat dukungan Kementerian Kominfo dalam menyambut masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Secara aktif Kementerian Kominfo bekerja sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi untuk mengantisipasi kenaikan trafik layanan, terutama di titik lokasi keramaian.

Antisipasi dilakukan dengan penambahan kapasitas tambahan agar pemudik tetap dapat menggunakan akses telekomunikasi. Selain itu, Kementerian Kominfo juga telah melakukan *rehearsal test* jaringan telekomunikasi dan *drive test* di sepanjang jalur mudik, serta meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam edisi kali ini rekan-rekan juga dapat membaca dan mengakses buku Mudikpedia Nataru, buku panduan berisikan informasi lengkap dan terkini terkait mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru. Buku panduan ini akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang merencanakan perjalanan mudik, karena memberikan tips-tips, informasi jalur, dan segala hal yang perlu Anda ketahui agar perjalanan Anda aman, nyaman, dan lancar.

Semuanya terangkum dalam KominfoNext edisi ke-60. Kami harap edisi kali ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi Anda semua. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru 2024, sampai jumpa dalam edisi-edisi berikutnya.

**Selamat membaca!**



**...setidaknya ada lima alasan perubahan itu perlu dilakukan, di antaranya perlindungan optimal bagi pengguna internet, termasuk anak-anak**

# Presiden Jokowi Songsong Ekonomi Nasional 2024 dengan Optimisme

Di samping itu, Kepala Negara juga optimistis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 masih berada di kisaran lima persen.



Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada acara Outlook Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan di Hotel St. Regis, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.  
Foto: BPMI Setpres/Vico

Presiden Joko Widodo menyampaikan optimismenya memasuki tahun 2024 dengan modal ekonomi dan politik yang dinilai baik. Hal penting yang digarisbawahi oleh Presiden adalah konsistensi dalam kerja keras dan bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut.

"Ekonomi *outlook* 2024 Indonesia sangat optimis. Optimisme karena melihat kinerja ekonomi kita dan optimis karena situasi politik yang dingin menjelang pemilu 2024. Yang penting konsisten kerja keras, kerja sinergis antara pemerintah dan swasta, dan kerja yang berkelanjutan," ucap Presiden dalam sambutannya pada acara *Outlook Perekonomian Indonesia* yang diselenggarakan di Hotel St. Regis, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.

Dari sisi ekonomi, Presiden menyampaikan bahwa sepanjang triwulan tahun 2023 ekonomi Indonesia masih tumbuh baik dalam rentang angka lima persen dan nilai inflasi yang jauh di bawah rata-rata inflasi global. Selain itu, indikator perekonomian lainnya juga berada pada angka yang baik.

"Penyerapan tenaga kerja naik sebanyak 4,5 juta orang dari Agustus 2022 ke Agustus 2023, PMI manufaktur di November 2023 masih berada di level ekspansif yaitu 51,7 (persen), neraca perdagangan masih surplus dan sudah surplus 43 bulan berturut-turut, Indeks Keyakinan Konsumen pada November juga berada di angka 123,6. Artinya, keyakinan kuat terhadap kondisi ekonomi kita," lanjutnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga optimistis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 masih berada di kisaran lima persen. Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar tetap berhati-hati dan waspada dengan situasi ketidakpastian global yang masih berlanjut hingga saat ini.

"Kalau orang Jawa bilang, tetep eling lan waspada. Harus selalu ingat hati-hati dan waspada. Ketidakpastian global masih berlanjut, konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga minyak global juga kemungkinan masih ada," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong seluruh pihak untuk terus konsisten dalam menarik investor baik dalam maupun luar negeri. Investasi tersebut, tambah Presiden, difokuskan untuk memberikan nilai tambah kepada negara.

"Investasi hilirisasi di semua sektor unggulan baik mineral, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan dan semuanya serta penguatan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan penguatan ekonomi biru," tambahnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.



...nilai inflasi yang jauh di bawah rata-rata inflasi global

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-songsong-ekonomi-nasional-2024-dengan-optimisme/>





Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 yang digelar di Puri Begawan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 15 Desember 2023. Foto: BPMI Setpres/Kris

## Presiden Jokowi Dorong Setiap Kota Miliki Strategi dan Gagasan Besar

Kepala Negara menilai bahwa setiap kota di Indonesia belum memiliki perbedaan kekuatan dibandingkan kota-kota lainnya.

Presiden Joko Widodo mendorong agar setiap kota memiliki perencanaan strategi dan gagasan yang besar, detail, serta memperlihatkan keunggulan dari masing-masing kota di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 yang digelar di Puri Begawan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 15 Desember 2023.

“Yang namanya desain kota, perencanaan besar strategi besarnya harus disiapkan dari sekarang. Semua kota harus memiliki rencana besar kotanya masing-masing. Sering saya sampaikan mestinya setiap kota itu memiliki perbedaan-perbedaan, karena unggulannya semuanya memiliki,” ujar Presiden.

Selanjutnya, Kepala Negara menilai bahwa setiap kota di Indonesia belum memiliki perbedaan kekuatan dibandingkan kota-kota lainnya. Padahal,

Presiden menyebut bahwa keunggulan tersebut akan menjadi karakter sebuah kota.

“Desain arsitektur kota itu semua kota harus memiliki, tetapi lebih detail lagi harus ada detail *engineering*-nya, sehingga jelas ini kota nanti 2050 akan menjadi kota apa. Karena sebetulnya keunggulan-keunggulan kuat itu akan nanti memunculkan karakter kota itu dibawa ke mana,” tutur Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi pun menjabarkan kota-kota di suatu negara yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat menjadi contoh kota-kota di Indonesia, salah satunya Keukenhof di Amsterdam.

“Tomohon misalnya menjadi kota bunga, kenapa tidak? Seperti di Keukenhof di Amsterdam. Kenapa tidak? Kenapa kita semua kota kita ini hampir mirip-mirip semuanya dengan *brand* yang mirip-mirip semuanya,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden menekankan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di setiap kota juga harus terkonsep secara maksimal. Presiden pun menegaskan bahwa prioritas penggunaan anggaran yang dimiliki setiap daerah harus jelas agar terlihat hasilnya.

“Apakah mau prioritas ke pendidikan ya sudah konsentrasi 60 persen anggaran masuk ke pendidikan, yang 40 (persen) dibagi sesuai dengan skala prioritas. Mau infrastruktur ya sudah 60 persen masuk ke infrastruktur semuanya, sehingga kelihatan (hasilnya),” tandas Presiden.

Tampak mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya Sugiarto.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-dorong-setiap-kota-miliki-strategi-dan-gagasan-besar/>



# Presiden Jokowi: Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi Berbasis Teknologi di Tanah Air

Presiden menekankan pentingnya mengevaluasi secara menyeluruh upaya pemberantasan korupsi.



Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023.  
Foto: BPMI Setpres/Rusman

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi di Tanah Air yang lebih sistemik, masif, serta memanfaatkan teknologi terkini. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023.

"Korupsi sekarang ini makin canggih, makin kompleks, bahkan lintas negara dan multijurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu, kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi," ucap Presiden.

Kepala Negara menyayangkan banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air. Oleh sebab itu, Presiden menekankan pentingnya mengevaluasi secara menyeluruh upaya pemberantasan korupsi.

"Kita perlu mengevaluasi total, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, ya. Tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total. Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak," tutur Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum, sistem pengadaan barang dan jasa, serta urusan perizinan berbasis digital berupa *Online Single Submission*.

"*Online Single Submission* (OSS) jangan sampai ketemu pengusaha dengan pejabat ini juga sangat membantu, *one map policy* saya kira memang belum selesai tetapi sudah 60-70 persen selesai dan 2024 akan kita selesaikan. Ini akan sangat membantu memagari orang untuk tidak korupsi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun menegaskan pentingnya penguatan regulasi di level undang-undang (UU) untuk mencegah tindak korupsi, seperti UU Perampasan Aset Tindak Pidana dan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

"Menurut saya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera," ujar Presiden.

"Kemudian juga Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

“

**...butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi**

<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-perkuat-sistem-pencegahan-korupsi-berbasis-teknologi-di-tanah-air/>



Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke-78 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 4 Desember 2023. Foto: BPMI Setpres/Rusman

## Pembangunan Infrastruktur untuk Efisiensi Biaya Logistik hingga Konektivitas Sosial Budaya

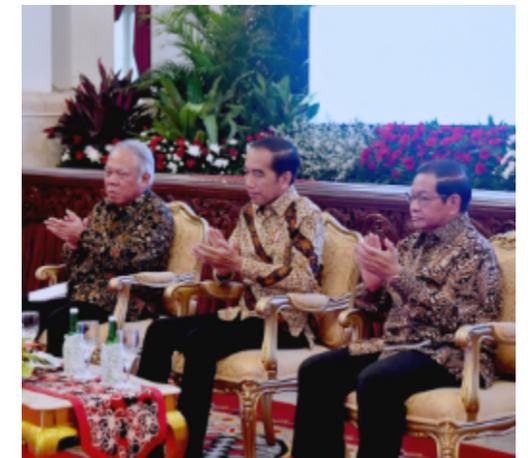
Presiden meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.



Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo selama sembilan tahun pemerintahannya hingga saat ini. Dalam sambutannya dalam acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke-78 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 4 Desember 2023, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun beragam infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur pelayanan masyarakat.

"Negara sebesar Indonesia dengan 17 ribu pulau semuanya membutuhkan yang namanya infrastruktur. Infrastruktur konektivitas berupa jalan, pelabuhan, *airport*, semuanya dibutuhkan. Infrastruktur dalam rangka penyediaan air dimulai dari bendungan, irigasi, dan juga infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan: rumah sakit, sekolah, pasar rakyat, semuanya juga dibangun oleh pemerintah, dikerjakan oleh PUPR," jelasnya.

Presiden Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia karena infrastruktur memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Presiden meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.



**...pemerintah telah membangun beragam infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur pelayanan masyarakat**



“  
...Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita

“Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Enggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada *airport*, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada *seaport*, mau ke sebuah pulau enggak bisa ada karena enggak ada jalan,” jelasnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan infrastruktur juga dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, infrastruktur juga memiliki fungsi untuk konektivitas sosial dan budaya.

“Infrastruktur itu juga mempersatukan. Karena ada *airport*, orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua, dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya, sekali lagi, juga mempersatukan,” imbuhnya.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 tersebut pun membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam *IMD Global Competitiveness Index* bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 mejadi peringkat 51 pada saat ini.

“Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi, peningkatan *Global Competitiveness Index* kita masih di angka 51, ya naik dari 54 ke 51,” ucapnya.

Kenaikan tersebut, ungkap Presiden, karena Indonesia membangun sejumlah infrastruktur antara lain 42 bendungan yang telah selesai, irigasi untuk 1,2 juta hektare lahan, jalan tol sepanjang 2.143 kilometer, jalan nasional sepanjang 5.700 kilometer, rumah sejumlah

8,2 juta melalui Program Sejuta Rumah, hingga pos lintas batas negara (PLBN) di sejumlah daerah.

“Tetapi kalau kita bandingkan dengan jalan tol yang ada di Tiongkok, kita ini total berarti hampir 3 ribu kurang dikit, 3 ribu kilometer. Jalan tol di RRT berapa Pak Menteri, ada yang tahu? 190 ribu kilometer. Bendungan kita ini total hampir 300 bendungan, di Korea 20 ribu bendungan, di RRT seingat saya 98 ribu bendungan. Jadi masih jauh, masih perlu kerja keras, meskipun ya kita melakukan sebuah lompatan,” ungkapnya.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pembangunan berbagai infrastruktur tersebut. Presiden Jokowi berpesan agar dalam perencanaannya, pembangunan infrastruktur bisa lebih komprehensif. Misalnya, saat membangun jalan, maka sebaiknya pengerjaannya mencakup drainase, trotoar, hingga lanskapnya.

“Saya rasa kemudian di kecepatan juga sangat baik. Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam pengerjaan realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum, itu yang saya lihat, dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului, itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai. Itu yang sebetulnya sudah saya tekankan kepada kementerian yang lain untuk meniru PUPR,” tandasnya.

<https://www.presidenri.go.id/siaran-https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pembangunan-infrastruktur-untuk-efisiensi-biaya-logistik-hingga-konektivitas-sosial-budaya/>

# Informasi dan Transaksi Elektronik



## Halo Sobatkom!

Sudah tahu belum, kalau pemerintah telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan Kedua UU ITE ini disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (05/12/2023).

Tapi SobatKom pernah bertanya-tanya nggak, sebenarnya apa itu informasi dan transaksi elektronik?



Mengutip UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



Sementara itu Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini termasuk pembelian *online*, transfer dana elektronik, pembayaran tagihan, dan lainnya.

Perkembangan informasi elektronik dan transaksi elektronik dimulai pada era 1960-an dengan munculnya jaringan komputer pertama, ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), sebuah proyek yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diketuai oleh Joseph Licklider. Awalnya, internet dibuat untuk kepentingan kesehatan dan militer yang hanya menghubungkan empat situs saja, yaitu University of Utah, Stanford Research Institute, Santa Barbara, dan University of California. Keempat universitas tersebut membentuk satu jaringan terpadu pada 1969.

Namun, pertumbuhan yang signifikan terjadi pada tahun 1990-an dengan munculnya *World Wide Web*, yang memungkinkan akses mudah ke informasi dan perdagangan *online*, meningkatkan banyaknya informasi elektronik yang beredar. Lalu, pada tahun 2000-an, munculnya teknologi seperti kartu kredit *online* dan sistem pembayaran digital mempercepat pertumbuhan transaksi elektronik. Dilanjutkan dengan perkembangan *mobile banking* dan dompet digital telah memperluas jangkauan transaksi elektronik hingga ke perangkat seluler.

Nah SobatKom, perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang meningkatkan penggunaan informasi dan transaksi elektronik ini membawa banyak keuntungan, di antaranya kemudahan akses dan efisiensi. Kita saat ini dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Proses transaksi pun dapat lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional.

Tak hanya itu, kita dapat melakukan transaksi skala besar secara simultan, dengan biaya yang rendah dan ekonomis jika dibandingkan transaksi fisik atau tradisional. Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan usaha di masyarakat.

Namun SobatKom juga perlu waspada dengan tantangannya, di antaranya:

### 01 Keamanan

Risiko keamanan informasi dan transaksi *online*, seperti pencurian identitas dan penipuan.

### 02 Privasi

Berkaitan dengan privasi data dan penggunaan informasi pribadi.

### 03 Ketergantungan pada Teknologi

Risiko gangguan sistem dan kegagalan teknis yang dapat mengganggu operasi.

### 04 Aksesibilitas

Tantangan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam penggunaan teknologi.

### 05 Regulasi

Kebutuhan akan peraturan yang jelas untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar.



**...menyempurnakan UU ITE sebagai payung hukum digital di Indonesia**

Terkait regulasi, berbagai yurisdiksi telah mengembangkan peraturan untuk mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Misalnya, di Amerika Serikat, Undang-Undang Transaksi Elektronik dan Global (*E-SIGN Act*) tahun 2000 memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi bisnis. Di Uni Eropa, Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) menetapkan standar perlindungan data yang ketat.

Sementara itu Indonesia memiliki dua peraturan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Pertama, ialah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pertama kali diundangkan pada 2008, dan telah melewati perubahan dua kali pada 2019 dan 2023. Perubahan tersebut dilakukan untuk terus menyempurnakan UU ITE sebagai payung hukum digital di Indonesia.

Regulasi kedua ialah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, September 2022 lalu. UU PDP menjadi payung hukum pelindungan data pribadi di Indonesia. UU ini mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP.

SobatKom, informasi elektronik dan transaksi elektronik telah mengubah cara kita berkomunikasi, bertransaksi, dan menjalankan bisnis. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, penting untuk terus memperhatikan keamanan, privasi, dan kepatuhan hukum dalam menghadapi tantangan yang muncul. Dengan manfaatnya yang besar, perkembangan dalam bidang ini akan terus menjadi fokus bagi individu, bisnis, dan pemerintah di masa depan.



KOMINFO

## Spinwheel Fitur Proteksi Data Pribadi saat Berinternet



# Sah! Perubahan Kedua atas UU ITE

Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital



dalam perubahan kedua, Menkominfo menekankan arti penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah resmi disahkan. Pengesahan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (05/12/2023).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan penyempurnaan atas pengaturan ruang digital itu memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum.

“Perubahan UU ITE didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum,” tegasnya saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden RI.

Menurut Menkominfo, UU ITE telah mengalami dua kali perubahan sejak diundangkan, Pertama, perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 yang menunjukkan dinamika dan keinginan masyarakat akan adanya penyempurnaan pasal-pasal UU ITE, khususnya akan ketentuan pidana konten ilegal.

“Delapan tahun sejak perubahan pertama, masih ada kebutuhan penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, baik secara nasional maupun global,” ungkapnya.

Adapun dalam perubahan kedua, Menkominfo menekankan arti penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat.

“Dinamika pembahasan tersebut memperkaya dan menghasilkan substansi RUU Perubahan Kedua UU ITE ke arah yang jauh lebih progresif dan komprehensif. Semua pembahasan ditujukan untuk memperkuat kebijakan nasional, untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas,” tegas Menkominfo.

Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri) menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani (dua kanan) di Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). Lewat pengetukan palu oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10. - (Pey HS)



## Perubahan dan Penambahan

RUU Perubahan Kedua UU ITE disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021. Dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE melalui 14 (empat belas) kali Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Pemerintah dengan Komisi I DPR RI. Selanjutnya Panja Pembahasan RUU menugaskan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) agar seluruh rumusan substansi RUU, termasuk penjelasannya disempurnakan dan disinkronisasi berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik.

Pada 21 November 2023, Panja Pembahasan RUU menyetujui laporan dari Timus dan Timsin RUU. Komisi I DPR RI dan Pemerintah kemudian menggelar Rapat Kerja pada 22 November 2023

menyetujui naskah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II Sidang Paripurna untuk disahkan.

Berdasarkan Rapat Panja serta Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE.

Beberapa norma pasal yang disempurnakan antara lain mengenai alat bukti elektronik (Pasal 5), sertifikasi elektronik (Pasal 13), transaksi elektronik (Pasal 17), perbuatan yang dilarang (Pasal 27, Pasal 27 (a), Pasal 27 (b), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidana (Pasal 45, Pasal 45 (a) dan Pasal 45 (b)), peran pemerintah (Pasal 40), dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 43).

Perubahan kedua UU ITE juga melengkapi materi yang meliputi identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 (a)), perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 16 (a) dan Pasal 16 (b)), kontrak elektronik internasional (Pasal 18 (a)), serta peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif (Pasal 40 (a)).

## Perlindungan atas HAM

Perubahan Kedua atas UU ITE menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan perubahan itu merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah mengedepankan perlindungan kepentingan umum serta bangsa dan negara.

“Sama halnya dengan ruang fisik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) bagi pengguna internet Indonesia di ruang siber, seperti yang telah tertuang pada konstitusi Indonesia,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Pemerintah di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (05/12/2023).

Menurut Menkominfo, perubahan RUU Kedua UU ITE memiliki arti penting sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum baik nasional maupun global.

“Ruang digital merupakan virtual *melting pot*, tempat pertemuan berbagai nilai, kebudayaan, kepentingan dan hukum yang berbeda,” tandasnya.

Menteri Budi Arie menyebut setidaknya ada lima alasan perubahan itu perlu dilakukan. Pertama, menurutnya ada penerapan norma-norma pidana dalam UU ITE yang berbeda-beda di berbagai tempat.



“Sehingga banyak pihak yang menganggap norma-norma UU ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat,” jelasnya.

Kedua, UU ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna internet Indonesia. Menkominfo menyoroti penggunaan produk atau layanan digital dapat memberi manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak jika digunakan secara tepat. Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik harus mengambil tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak, sekaligus melindungi anak dari bahaya atau risiko fisik dan psikis.

“**...Menkominfo menyoroti penggunaan produk atau layanan digital dapat memberi manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak jika digunakan secara tepat**”

"Dalam berbagai situasi, anak belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memahami risiko dan potensi pelanggaran haknya dalam produk atau layanan digital," tuturnya.

Ketiga, Menteri Budi Arie menyatakan pemerintah memperhatikan pembangunan ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar, yang diperkirakan akan menyumbang sepertiga potensi ekonomi digital di kawasan ASEAN.

"UU ITE yang ada saat ini perlu mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun ekosistem digital. Melihat besarnya potensi ekonomi digital Indonesia, pemerintah perlu memperkuat regulasi dalam memberikan perlindungan pengguna layanan digital Indonesia dan pelaku UMKM," jelasnya.

Selanjutnya, Menkominfo menyoroti perkembangan layanan sertifikasi elektronik seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik dan autentikasi situs web serta identitas digital.

"Indonesia butuh landasan hukum yang lebih komprehensif dalam membangun kebijakan identitas digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya," tandasnya.

Menteri Budi Arie juga menegaskan perubahan UU ITE diperlukan berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Menurutnya saat ini memerlukan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana siber, khususnya yang menggunakan rekening bank dan aset digital dalam skema kejahatan.

"Dalam hal ini, PPNS di sektor informasi dan transaksi elektronik (ITE) butuh kewenangan untuk memerintahkan penyelenggara sistem elektronik dalam melakukan pemutusan akses sementara terhadap rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital," tegasnya.



## Tingkatkan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan Perubahan Kedua (UU ITE) akan meningkatkan perlindungan anak-anak yang mengakses layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Revisi kedua UU ITE akan menjadi momentum bagus untuk memasukkan perlindungan hak anak dalam mengakses layanan internet dan dunia digital. Harus ada upaya preventif agar konten-konten di dunia maya tidak merugikan anak-anak," jelasnya dalam Diskusi dengan Pekerja Media mengenai Hasil Rapat Paripurna DPR RI di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (05/12/2023).

Menurut Dirjen Samuel, perlindungan anak terhadap dunia digital sudah diterapkan di Amerika dan Eropa. Lewat Perubahan Kedua UU ITE, penyedia platform di dunia digital diwajibkan proaktif untuk mencegah anak-anak bisa mengakses konten yang tidak sesuai umur mereka.

“...UU ITE akan menjadi momentum bagus untuk memasukkan perlindungan hak anak dalam mengakses layanan internet”

"Jadi mau tidak mau penyedia platform harus menyiapkan mekanisme untuk perlindungan anak. Penyedia platform harus bisa mendeteksi adanya penyalahgunaan," tandasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan PSE harus proaktif mengawasi pengguna layanan. Hal ini dijamin dengan pengaturan kewajiban PSE untuk memberi perlindungan bagi anak yang menggunakan maupun mengakses akses elektronik.

"Hak anak juga harus dilindungi jangan sampai terekspos melebihi usianya. Mereka harus mendeteksi apakah banyak anak-anak yang menggunakan platform buatan mereka. Jadi, ketika memang bisa diakses oleh anak mereka harus dan berkewajiban menghapus segala konten dewasa di platform mereka," jelasnya.

Menurut Dirjen Samuel, masalah perlindungan anak tidak hanya diatur dalam Pasal 16a Perubahan Kedua UU ITE. Bahkan, Pemerintah akan membuat peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail mengenai perlindungan anak di ruang digital.





“Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman dan inovatif. Dari revisi UU ITE akan menghadirkan tiga PP. Pertama, merevisi PP yang sudah ada yaitu PP 71 tahun 2019. Lalu di dalam revisi UU ini nanti ada PP khusus untuk pasal 40a yang mengatur adanya keseimbangan, dan pasal baru tentang perlindungan anak juga akan ada PP baru,” tuturnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menegaskan anak-anak tidak boleh menjadi alat untuk mencapai keuntungan tertentu melalui konten elektronik, dan anak-anak pun tidak boleh menjadi *target marketing* bagi siapapun.

“Dengan adanya perlindungan ini, Pemerintah akan mengoptimalkan tindakan lebih lanjut pada konten-konten yang melanggar ketentuan. Nantinya, Kominfo akan menemukan konten pelanggaran dari hasil patroli maupun aduan,” tandasnya.

“  
...Lewat Perubahan Kedua UU ITE, penyedia platform di dunia digital diwajibkan proaktif untuk mencegah anak-anak bisa mengakses konten yang tidak sesuai umur mereka

## Selaras dengan KUHP

Perubahan Kedua UU ITE sudah selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Ada beberapa pasal dalam UU ITE itu akan berlaku bersamaan dengan UU KUHP yang baru berlaku 1 Januari 2026. Namun ada pula beberapa Pasal UU ITE yang akan dicabut (saat UU KUHP diterapkan),” ungkapnyanya dalam Diskusi dengan Pekerja Media mengenai Hasil Rapat Paripurna DPR RI di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (05/12/2023).

Dirjen Semuel menyatakan beberapa norma dalam revisi UU ITE itu merupakan adopsi dari UU KUHP sekaligus memberikan penjabaran detail dari UU ITE sebelumnya. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo memberikan contoh Pasal 27A sebagai salah satu norma perubahan. Pasal itu menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

“Contohnya Pasal 27, ada yang bertanya juga loh sekarang pasal di undang-undang itu dicabut, 27a kenapa diciptakan. Nah itu pemisahan saja, 27a juga dicabut nantinya dalam UU KUHP-nya berlaku ya,” jelasnya.



Selanjutnya, Dirjen Semuel menyebut adanya perubahan pada norma "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan.." Menurutnya pemilihan kalimat itu merupakan penambahan dari UU ITE yang lama.

"Di UU ITE yang baru, ada kata-kata menyiarkan dan mempertunjukkan. Itu diambil, diadopsi dari definisi di KUHP. Sedangkan dalam UU ITE yang lama, penjelasan tidak komprehensif. Ini kita menjelaskan apa yang dimaksud menyiarkan, mendistribusikan, semua itu dijelaskan supaya tidak ada multitafsir," tuturnya.

Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat 2 tidak ada perubahan, namun ditambahkan penjelasan dan merupakan adopsi dari UU KUHP yang baru kemudian dimasukkan dalam penjelasan lanjutan.

"Pasal 27 ayat 2 terkait dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan perjudian," jelas Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Menurut Dirjen Semuel, pengaturan itu mengacu pada ketentuan perjudian dalam UU KUHP. "(Kalimat)...dalam hal menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikan sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan turut serta dalam berusaha untuk itu. Jadi, ini diambil juga dari KUHP," tuturnya.



“

...kita menjelaskan apa yang dimaksud menyiarkan, mendistribusikan, semua itu dijelaskan supaya tidak ada multitafsir



# Selamat Hari Ibu

22 Desember 2023



## Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

# Kominfo Luncurkan Visi Indonesia Digital 2045



Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi meluncurkan dokumen Visi Indonesia Digital (VID) 2045. Peluncuran dokumen strategi berisi rekomendasi arah kebijakan dan strategi nasional bidang digital tersebut dilakukan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.



"Saya harap VID 2045 ini dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam membuat sekaligus mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menyukseskan transformasi digital Indonesia," ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam sambutan *Launching* Visi Indonesia Digital 2045 di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Menurut Menkominfo, VID 2045 dirancang dengan memperhatikan prioritas pembangunan pada berbagai dokumen strategis bidang digital yang ada. Dokumen meliputi Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian awal Desember lalu.

"Seluruh dokumen tersebut merupakan upaya baik yang patut diapresiasi. Selanjutnya bagaimana implementasinya dapat dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. VID 2045 menawarkan alternatif guna memperkaya upaya dan strategi yang sudah ada, dengan menyoroti pemanfaatan teknologi digital secara produktif dan terarah," jelasnya.

VID 2045 menggambarkan analisis terhadap identifikasi isu relevan, perkembangan tren teknologi, peluang, serta pertimbangan terhadap dampak ekonomi, sosial, dan budaya dalam penyelenggaraan transformasi digital.

"Melalui tiga pendekatan utama, VID 2045 menyajikan strategi konkret untuk mencapai target nasional jangka panjang Indonesia, yakni pendekatan ekosistem, pendekatan sektoral, dan pendekatan kewilayahan," ungkap Menteri Budi Arie.

Menkominfo menyatakan proses analisis dilakukan dengan pertimbangan kondisi baseline, tren ke depan, dan aspirasi yang ingin dicapai.

"Perancangan arah kebijakan di dalam perspektif pengembangan pilar-pilar ekosistem digital nasional, perspektif sektoral, hingga perspektif kewilayahan," tuturnya.

Adapun penentuan sasaran dan arah kebijakan diupayakan cukup memberikan ruang pada perkembangan teknologi digital. Namun, Menteri Budi Arie menekankan semua itu tetap dalam koridor pengendalian yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

“Dokumen strategis ini merefleksikan semangat kolaboratif dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” tandasnya.

Peluncuran Visi Indonesia Digital 2045 disaksikan pemangku kepentingan bidang digital, baik kementerian, lembaga, perwakilan sektor industri, praktisi dan asosiasi, perwakilan organisasi perangkat daerah, hingga akademisi.

## Libatkan 50 Pemangku Kepentingan

Sebelumnya, saat menghadiri Peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030, Menkominfo menjelaskan penyusunan VID 2045 melibatkan 50 *stakeholders*, seperti kementerian dan lembaga terkait, perusahaan teknologi global dan asosiasi di bidang digital.

“Proses sinkronisasi dengan berbagai dokumen pemerintah di bidang digital juga dilakukan untuk memastikan keselarasan antardokumen,” tuturnya di Jakarta Selatan, Rabu (06/12/2023).

Kerangka VID 2045 disusun dengan menempatkan infrastruktur digital sebagai fondasi transformasi digital, yang menopang tiga pilar utama, yaitu:

- 01 Pemerintahan digital yang responsif
- 02 Ekonomi inovatif berbasis teknologi digital
- 03 Inklusi digital bagi seluruh masyarakat

Adapun pencapaian VID dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembangunan digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.



## Terapkan Dua Langkah Strategis

Kegiatan Peluncuran VID 2045 tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. Dalam sambutannya Wamenkominfo menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi penyusunan dua langkah strategis guna menyelaraskan strategi transformasi digital nasional. Wamenkominfo Nezar Patria menjelaskan kedua langkah strategis berupa penyusunan Visi Indonesia Digital (VID) 2045 dan pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional.

“Visi Indonesia Digital 2045 ini dibuat sebagai panduan akselerasi transformasi digital. Dalam prinsipnya, dokumen ini memberikan pondasi untuk mengadopsi teknologi dan mengakselerasi capaian yang sudah dilakukan kementerian, lembaga, dan juga sektor lain,” jelasnya saat membuka *Launching* Visi Indonesia Digital 2045 di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Sejak pandemi Covid-19, muncul berbagai program, kebijakan, regulasi, fasilitasi, dan aksi nyata yang dilakukan secara kolaboratif untuk mempercepat laju digitalisasi di berbagai sektor. Menurut Wamen Nezar Patria, berbagai pilihan strategi pun muncul dari beragam *masterplan* dan *roadmap* pada setiap lembaga.

“...Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi penyusunan dua langkah strategis guna menyelaraskan strategi transformasi digital nasional

“Jadi memang ada banyak roadmap, blueprint, tapi semuanya berbicara hal yang sama, tentang membangun infrastruktur, mempersiapkan SDM yang cakap digital, dan bagaimana memperkuat ekosistem bisnis digital atau ekonomi digital di masa depan. (Dokumen ini) kita anggap sebagai satu navigasi menuju Indonesia Digital 2045,” tuturnya.

Wamenkominfo menyatakan VID 2045 menjadi rekomendasi arah kebijakan dan strategi nasional dalam perencanaan dan pembangunan digital ke depan.

“Ditawarkan untuk menjadi suatu perjalanan yang saling berdampingan, agar implementasi program dapat berjalan secara terarah dan sinergis,” ungkapnya.

Menurut Wamen Nezar Patria, penyusunan VID 2045 berlangsung lewat proses iterasi sejak Tahun 2022 melalui kajian bersama konsultan internasional dan terus disempurnakan hingga tahun ini.

“Seluruh proses diupayakan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, antara lain kementerian, lembaga, asosiasi, akademisi, dan sektor privat,” tuturnya.

kementerian, lembaga, asosiasi, akademisi, dan sektor privat,” tuturnya.

Wamenkominfo menyatakan dengan adanya arah yang jelas, peluang Indonesia menjadi top 5 negara dengan ekonomi terkuat di dunia akan lebih mudah terwujud.

“Saya kira hampir semua kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang ada di Indonesia pada hari ini hampir bisa dipastikan punya visi yang sama tentang apa yang akan kita capai nanti di 2045. Arah kita jelas, kita ingin merebut satu kesempatan,” ungkapnya.

Wamenkominfo Nezar Patria berharap VID 2045 dapat menjadi *living document* yang bisa diperbarui mengimbangi perkembangan teknologi. Menurutnya, Tahun 2045 menjadi rentang waktu yang panjang.

“Ada 22 tahun, dan kita tahu teknologi digital ini sangat dinamis, penuh dengan kejutan-kejutan. Jadi VID 2045 bisa terus kita perbaharui, terus kita perkaya, dan kita integrasikan dengan perkembangan terbaru,” tandasnya.



Wamenkominfo menyatakan dengan adanya arah yang jelas, peluang Indonesia menjadi top 5 negara dengan ekonomi terkuat di dunia akan lebih mudah terwujud.

“Saya kira hampir semua kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang ada di Indonesia pada hari ini hampir bisa dipastikan punya visi yang sama tentang apa yang akan kita capai nanti di 2045. Arah kita jelas, kita ingin merebut satu kesempatan,” ungkapnya.

Wamenkominfo Nezar Patria berharap VID 2045 dapat menjadi *living document* yang bisa diperbarui mengimbangi perkembangan teknologi. Menurutnya, Tahun 2045 menjadi rentang waktu yang panjang.

“Ada 22 tahun, dan kita tahu teknologi digital ini sangat dinamis, penuh dengan kejutan-kejutan. Jadi VID 2045 bisa terus kita perbaharui, terus kita perkaya, dan kita integrasikan dengan perkembangan terbaru,” tandasnya.

## Jadi Pendukung Kolaborasi Ekonomi Digital Nasional

Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan dengan perumusan Visi Digital Indonesia 2045, Pemerintah menyatukan arah kebijakan, sinergi dan regulasi untuk mengoptimalkan potensi teknologi di Indonesia.

“Visi tersebut menguraikan pencapaian dasar dari implementasi peta jalan digital Indonesia. VID juga menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait dalam menyusun arah kebijakan, strategi, dan kerangka regulasi yang diperlukan,” jelasnya dalam *Huawei Indonesia Supplier Convention 2023: For the Digital and Golden Future of Indonesia Collaborative, Innovative, Win-Win*, di Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

“...VID juga menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait dalam menyusun arah kebijakan, strategi, dan kerangka regulasi yang diperlukan

Menurut Wamen Nezar Patria, kemajuan teknologi yang pesat terus memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Secara global, mengutip data Bank Dunia, Wamenkominfo menyebutkan ekonomi digital menyumbang lebih dari 15% Pendapatan Domestik Bruto dunia.

“Dan telah tumbuh 2,5 kali lebih cepat selama 10 tahun sebelumnya dibandingkan PDB dunia fisik. Untuk Indonesia dengan kemahiran yang memadai dalam teknologi digital tentunya akan meningkatkan produktivitas, transformasi digital sangat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% hingga 6,2% pada tahun 2045,” jelasnya.

Wamen Nezar Patria menyatakan di tengah peluang tersebut ada berbagai tantangan seperti disrupsi teknologi, kesenjangan digital, dan masalah keamanan siber. Oleh karena itu, Wamenkominfo menekankan upaya kolaboratif yang mendorong inovasi dan *win-win solution*.



“...dalam mempercepat transformasi digital Indonesia, Kementerian Kominfo dan Huawei telah menandatangani nota kesepahaman mengenai 14 solusi di sektor teknologi informasi dan komunikasi

“Melalui kerja sama yang erat, kedua belah pihak semakin kuat dalam mewujudkan masa depan digital Indonesia yang dinamis,” tandasnya.

Wamenkominfo mengapresiasi keterlibatan sektor swasta sebagai bagian dari upaya mewujudkan masa depan digital dan Indonesia emas.

“Sebagai bukti atas partisipasi dalam mempercepat transformasi digital Indonesia, Kementerian Kominfo dan Huawei telah menandatangani nota kesepahaman mengenai 14 solusi di sektor teknologi informasi dan komunikasi pada tahun lalu,” ungkapnya.

Wamenkominfo berharap potensi dan tantangan teknologi digital tidak akan menjadi penghalang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di era digital.

“Mari kita teruskan dan perkuat kolaborasi kita untuk mewujudkan Indonesia yang terhubung, makin digital, makin maju,” ajaknya.

## VID 2045 Usung Tiga Pendekatan Strategi Pemanfaatan Teknologi Digital

Seperti yang disampaikan Menkominfo sebelumnya, VID 2045 memperkenalkan tiga pendekatan dalam strategi pemanfaatan teknologi digital yang produktif dan terarah, yaitu perspektif ekosistem, sektoral, dan kewilayahan.

“Yang pertama adalah pendekatan ekosistem digital. Visi Indonesia Digital dicapai dengan memperkuat fondasi *building blocks*, yaitu infrastruktur digital dan ekosistemnya, yang mencakup keamanan dan data, riset dan inovasi, SDM digital, serta regulasi kebijakan,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba dalam acara *Launching Visi Indonesia Digital* di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

*Building blocks* tersebut, menurut Sekjen Mira, akan menjadi fondasi bagi tiga pilar VID 2045, yaitu pemerintahan digital yang modern dan responsif, ekonomi inovatif berbasis teknologi digital, serta masyarakat digital berdaya dan berbudaya. Keseluruhan pondasi dan tiga pilar tersebut akan membentuk *key performance index* (KPI) dan sasaran.

“Di antaranya mengenai jangkauan atau *coverage* dan kualitas *mobile broadband*, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB, tenaga kerja TIK terhadap total tenaga kerja, dan peringkat indeks *e-government* Indonesia di tataran global,” jelas Sekjen Kominfo.



Untuk mencapai KPI dan sasaran tersebut, VID 2045 dikerucutkan agar berfokus pada delapan strategi imperatif.

## 8 Strategi Imperatif

01

Penyediaan konektivitas yang merata, berkualitas, berkapasitas tinggi, beserta ekosistem infrastruktur dan teknologinya

02

Penguasaan teknologi digital masa depan berbasis riset dan inovasi untuk penguatan ekonomi, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan

03

Menjaga kedaulatan data dan perlindungan privasi masyarakat dengan kebijakan, regulasi, dan kerjasama yang komprehensif

04

Penguatan teknologi dan ekosistem keamanan siber untuk mendukung transformasi digital yang aman

05

Pembentukan masyarakat digital yang berbudaya, berdaya saing, dan produktif dalam menghadapi tantangan masa depan

06

Pembentukan regulasi dan institusi yang adaptif di dalam ekosistem digital nasional

07

menciptakan iklim yang kondusif demi peningkatan investasi di bidang digital

08

Meningkatkan kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital yang merata ke seluruh wilayah Indonesia

Pendekatan kedua dalam VID 2045 adalah pendekatan sektoral. "Kami mencoba untuk memotret beberapa sektor pembangunan, seperti manufaktur, pertanian, kelautan, pariwisata, logistik, pendidikan, kesehatan, TIK, perdagangan, serta layanan keuangan," jelas Sekjen Kominfo.

Pendekatan tersebut dipotret dengan melihat tinjauan atas dua hal, yaitu tingkat maturitas digital dan kontribusi sektor terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kenapa kita harus paham ini? Karena kita akan membangun skenario, apakah Indonesia tetap menjadi konsumen teknologi, menjadi prosumen teknologi, atau mau menjadi inovator," tuturnya.

"Jadi kami berusaha untuk men-*slicing* pendekatan penyusunan arah kebijakan ini dari tiga hal itu tadi, dari ekosistemnya, dari sektoralnya, dan dari kewilayahan,"

Pemerintah mencatat bahwa dari keseluruhan sektor pembangunan yang disebutkan di atas, perdagangan dan retail tergolong dalam sektor yang maju. "Hal ini tidak mengejutkan, karena beberapa tahun belakangan sangat terlihat upaya pemerintah yang konsisten, pelaku ekosistem, juga dorongan dari masyarakat, fokus kepada perdagangan melalui sistem elektronik," tegas Sekjen Mira.

VID 2045 diharapkan menjadi dokumen hidup (*living document*) yang dapat terus diperbarui sesuai perkembangan teknologi dalam 20 tahun mendatang.

Kedepannya ia berharap, dengan meningkatkan tingkat maturitas digital di sektor-sektor pembangunan, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonominya dan mencapai aspirasi Indonesia emas.

"Kami sangat menyadari bahwa alam semestanya digital itu sangat luas, isunya sangat luas dan sangat kompleks. Kami menempatkan VID 2045 ini sebagai opsi rekomendasi yang bersifat *living document*, karena membicarakan teknologi digital dalam *time span* 20 tahun sangat sulit. Kita akan terus memperbaharuiya sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi," pungkas Sekjen Mira.

Aspek pendekatan ketiga dalam VID 2045 adalah kewilayahan. Menurut Sekjen Kominfo, VID 2045 memberikan rekomendasi pembangunan fondasi dan ekosistem digital pada daerah, dengan mempertimbangkan keunikan, potensi, dan kekuatan yang beragam dari daerah.

Dokumen Visi  
Indonesia Digital  
2045 dapat  
diunduh melalui

[digital2045.id](https://digital2045.id)



# Kesiapan Jelang Natal dan Tahun Baru 2024

Kominfo Pantau Jaringan Telekomunikasi Mudik



Menjelang libur nasional peringatan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama penyelenggara layanan telekomunikasi telah mengambil langkah antisipatif menghadapi kenaikan trafik layanan, terutama di titik lokasi keramaian lalu lintas.



"Kita memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan trafik telekomunikasi selama periode Natal dan Tahun baru. Para opsel juga telah kami minta melakukan upaya antisipatif untuk menghadapi kenaikan trafik ini," ujar Direktur Jenderal informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam Konferensi Pers Persiapan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di *Press Room* Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Menurut Dirjen Usman Kansong, penyelenggara layanan telekomunikasi seluler telah menyiapkan kapasitas tambahan agar pemudik dapat tetap menggunakan akses telekomunikasi.

Telkom Indonesia telah menyiapkan kapasitas 49,7 Tbps dan ekspansi kapasitas *backbone* sebesar 28,3 Gbps. Kemudian, Telkomsel meningkatkan sekaligus menyiapkan kapasitas *Gateway GPRS Support Node* (GGSN) hingga 13,21 Tbps dan kapasitas internet sebesar 11,08 Tbps.



Sementara itu Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH), juga akan meningkatkan kapasitas jaringan internetnya hingga 50% lebih besar dibandingkan saat kondisi normal. Demikian juga dengan XL Axiata yang menambah kekuatan jaringan 2 kali lipat lebih besar dari biasanya. Selanjutnya Smartfren juga menambah 6% dari kapasitas normal.

Menurut Dirjen Usman Kansong, untuk menjaga keandalan layanan telekomunikasi, petugas dari masing-masing penyelenggara layanan telekomunikasi akan bersiaga 24 jam selama 7 hari di Posko Jalur Mudik.

“Kami meminta mereka untuk siaga 24 jam selama satu minggu terutama di saat-saat puncak liburan Nataru. Operator seluler akan meningkatkan kapasitasnya dan mengarahkan petugasnya. Lalu, ada juga *command center* dan *call center* yang siap untuk melayani kebutuhan telekomunikasi masyarakat jika terjadi kendala jaringan seluler,” tuturnya.

Kementerian Kominfo juga meminta penyelenggara layanan telekomunikasi melakukan optimasi kualitas dan kapasitas jaringan di titik-titik keramaian seperti jalur mudik, pusat perbelanjaan, pusat transportasi, tempat wisata, tempat ibadah hingga area residential dengan pertumbuhan *traffic broadband* signifikan.

“Dan, yang lebih penting juga kita menambah *Mobile Base Transceiver Station* di pusat keramaian, tempat wisata, serta ruang-ruang publik,” ujar Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

“...masing-masing penyelenggara layanan telekomunikasi akan bersiaga 24 jam selama 7 hari

## Rehearsal Test dan Drive Test Jaringan Telekomunikasi

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika SDPPI Kementerian Kominfo juga telah melakukan *rehearsal test* jaringan telekomunikasi dan *drive test* di sepanjang jalur mudik. “Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga dengan baik,” tandas Dirjen Usman Kansong.

Lebih dari itu, Kementerian Kominfo juga meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. “Misalnya seperti di bandara, pelabuhan ataupun terminal yang akan mengalami peningkatan *traffic*,” tutur Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

Sementara itu untuk penyelenggaraan pos dan logistik Pemerintah menambah kapasitas pengiriman berupa *collection, processing, transporting, dan delivery*.

“Kami perkirakan akan terjadi lonjakan volume pengiriman hingga 40% dibanding saat normal, ditambah total kiriman *e-commerce* yang mencapai 9 hingga 11 juta paket perhari,” jelas Dirjen Usman Kansong.

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo., penyelenggaraan layanan pos telah siap mendukung aktivitas tersebut.

“Bahkan, saat ini telah tersedia jaringan pos di seluruh kabupaten dan kota. Adapun titik layanan pos tersebut berupa kantor dan gerai. sebanyak 3.557 jaringan yang tersebar di 7.230 kecamatan,” tuturnya.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan semua langkah ini untuk memastikan tidak terjadi gangguan dari peningkatan trafik saat periode Nataru 2023-2024.



“Kami berharap liburan Nataru 2023/2024 akan berjalan aman, lancar, dan menyenangkan bagi seluruh masyarakat yang melaksanakannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, dan Nomor 2 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam SKB tiga menteri itu terdapat hari libur nasional Hari Raya Natal jatuh pada Senin (25/12/2023) dan cuti bersama pada Selasa (26/12/2023).

Pemerintah juga menyiapkan strategi komunikasi publik untuk mendukung rangkaian mudik perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun baru 2024 (Nataru) berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Salah satunya dilakukan dengan memproduksi buku elektronik Panduan Natal dan Tahun Baru. Menurut Dirjen Usman Kansong, panduan ini memuat informasi yang dibutuhkan pemudik mulai dari ketersediaan moda transportasi, daerah tujuan perjalanan Nataru, dan informasi penting lain termasuk tautan akses bersama dengan CCTV Jasa Marga.

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi panduan untuk mudik aman dan nyaman. Di dalamnya tersedia beragam informasi seperti lokasi istirahat, cara pendaftaran mudik gratis, hingga peta kuliner dari berbagai daerah.

“Hadirnya buku elektronik ini menjadi serasa menikmati libur Nataru. Jadi, dengan mengakses buku ini kita bisa tahu mana daerah yang barangkali macet begitu, mana yang lancar. Kita menyebutnya Mudikpedia Nataru, yang bisa diakses melalui laman <https://s.id/mudikpedia>,” tuturnya.

# Mudikpedia Natal dan Tahun Baru

Paket informasi lengkap seputar mudik Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024



e-Book Mudikpedia Nataru 2023/2024



e-Book Pantauan Angkutan Nataru 2023/2024



Buku Kuliner dan Pariwisata 2023



Peta Kuliner 2023



Nomor-Nomor Penting

## Pantauan Lalu Lintas



Live CCTV Lalu Lintas RTTMC



LIVE CCTV Lalu Lintas Bandung - Jawa Barat



LIVE CCTV Lalu Lintas Jawa Timur (via App SITS)



Live CCTV Jalan Tol PBJT PU



LIVE CCTV Lalu Lintas Jasa Marga (via App Travoy)



LIVE CCTV Lalu Lintas Pelabuhan Tanjung Priuk PELINDO



WTR Go - Informasi Jalan Tol Waskita Toll Road

## Mudik Gratis



Daftar Mudik Gratis Naik Bus (via Android App MitraDarat)



Daftar Mudik Gratis Naik Bus (via iOS App MitraDarat)

## Pesan Tiket



Pesan Tiket KAI



Pesan Tiket Kapal Ferry

## Informasi Lainnya



Cek Tarif Tol BPJT PU



Perkiraan Cuaca Mudik BMKG

## Menkominfo: Perayaan Natal Nasional 2023 Simbol Persatuan Umat Beragama



Perayaan Natal Tahun 2023 menjadi momentum perhelatan bagi umat Nasrani dan menjadi simbol persatuan umat beragama di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan tahun ini menjadi Perayaan Natal Nasional dengan jumlah jemaah yang paling besar.

"Setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Sebagaimana para Orang Majus dari jauh yang bersemangat menemui Bayi Yesus di dalam Palungan, kehadiran sekitar 16.000 ribu jemaah pada malam ini juga membawa sukacita dan kebersamaan yang luar biasa untuk merayakan kelahiran-Nya," ungkapnya dalam acara Puncak Perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Sebagai Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional Tahun 2023, Menkominfo menyatakan tema "Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi" yang diangkat merupakan suatu kabar baik dan menjadi sebuah sukacita besar.

"Dimana kita dapat berkumpul untuk merayakan Natal Tahun 2023. Tema dikutip Dari Injil Lukas Pasal 2 ayat 14. Ayat ini merupakan suatu kabar baik yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala yang sedang berjaga pada malam hari, bahwa Sang Raja Damai telah tiba di dunia," jelasnya.

Menteri Budi Arie mengharapkan seluruh umat Kristiani merawat keberagaman, sembari terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perwujudan dari panggilan Tuhan.

"Sebagaimana Yesus Kristus Sang Pembawa Damai Lahir ke dunia, umat kristiani juga diingatkan untuk senantiasa menyebarkan kasih dan mewartakan kedamaian," ungkapnya.

Menkominfo menjelaskan perayaan Natal tahun ini selain dengan ibadah, juga diisi dengan penampilan pujian dan kegiatan sosial.

"Tidak hanya diisi oleh berbagai penampilan pujian yang dinaikkan untuk merayakan kehadiran Tuhan, tetapi ada kegiatan sosial sebagai perwujudan kasih kepada sesama untuk memuliakan Allah Sang Sumber Segala Kehidupan," tuturnya.

Menteri Budi Arie mengapresiasi keterlibatan semua pihak termasuk dukungan aktif umat lintas agama dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Perayaan Natal Nasional Tahun 2023.

"Ini tak akan terjadi tanpa pertolongan Tuhan yang turun melalui kontribusi dari berbagai pihak, maupun dukungan yang diterima dari peranan aktif umat lintas agama, seperti saudara-saudara Banser yang turut membantu pengamanan kegiatan hari ini," tuturnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi juga mengucapkan Selamat Natal Tahun 2023 dan Selamat menyambut Tahun Baru 2024 kepada semua umat kristiani di nusantara.

"Kiranya damai, kasih, dan sukacita natal senantiasa menyertai kita semua," ungkapnya.

Acara itu dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menkopolkam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR-BPN Hadi Tjahjanto, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri Parekras Sandiagra Uno, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Selain itu juga tampak hadir Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel, Wamenag Zainit Tauhid, Wamenparekras Angela Tanoesoedibjo dan Wamenkominfo Nezar Patria.

Hadir pula Duta Besar Takhta Suci Vatikan Piero Pioppo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tampak pula Ketua Umum PGI, Ketua Presidium KWI, Gembala Sidang Bethany Nginden Surabaya, dan Tokoh Lintas Agama.



## Wamen Nezar Patria Tantang Anak Muda Bangun IKN



Perayaan Natal Nasional 2023 membawa pesan perdamaian bagi seluruh umat Kristen dan Katolik di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan perdamaian di tengah keberagaman itu tampak dalam kerja sama berbagai kementerian, lembaga maupun umat beragama dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Perayaan Natal Nasional 2023.

"Ini sejalan dengan semangat hidup dalam keberagaman. Jadi, tidak hanya kerja sama lintas kementerian dan lembaga, tetapi juga kerja sama antarumat beragama juga terjalin dalam perayaan Natal Nasional kali ini," ujarnya dalam Konferensi Pers Perayaan Natal Nasional 2023 di di Graha Bethany Nginden, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Selaku Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2023, Menteri Budi Arie menjelaskan dalam rangkaian acara akan digelar doa bersama yang akan dibawakan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gultom dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Anton Subianto.

"Untuk perdamaian, kerukunan, persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Kita juga menginginkan perdamaian di seluruh bumi, di seluruh negara," jelasnya.

“...tidak hanya kerja sama lintas kementerian dan lembaga, tetapi juga kerja sama antarumat beragama juga terjalin dalam perayaan Natal Nasional kali ini

Menkominfo menyatakan pengisi acara maupun pihak-pihak yang mendukung terlaksananya Perayaan Natal Nasional 2023 memiliki latar belakang agama yang beragam.

"Sebagai contoh peran aktif dari rekan-rekan Banser (Barisan Ansor Serbaguna -Nahdlatul Ulama) dalam pengamanan acara serta dari tokoh agama lain," ungkapnya.

Selama ini, penyelenggaraan Perayaan Natal Nasional belum pernah berlangsung di Kota Surabaya. Oleh karena itu, para jemaah yang hadir, menurut Menteri Budi Arie berasal dari Kota Surabaya dan daerah sekitar di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Menkominfo, Perayaan Natal Nasional tahun ini, pelaksanaan berlangsung pada bulan Desember 2023. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang bisa berlangsung pada bulan Januari. Namun, Menkominfo menegaskan bahwa Perayaan Natal Nasional 2023 tidak memiliki tujuan politis.

"Kami tidak menjadikan Perayaan Natal Nasional ini sebagai panggung politik. Warna pakaian

Ini adalah Perayaan Natal Nasional bagi umat nasrani se-Indonesia. Semoga damai kasih sukacita Natal dapat senantiasa menyinari kita semua," tandasnya.

Perayaan Natal Nasional dimeriahkan dengan sejumlah pengisi acara seperti Nella Kharisma dan Gempita Gading. Rangkaian kegiatan terdiri atas ibadah mulai pukul 16.30 WIB dan berlanjut dengan Perayaan Natal Nasional pada pukul 18.00 WIB. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam Perayaan Natal Nasional pada pukul 18.20 WIB.



## Menteri Budi Arie Terima Penghargaan CNBC Indonesia Awards 2023



### ...apresiasi atas keberanian dan ketegasan dalam menindak kejahatan di dunia maya

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menerima penghargaan CNBC Indonesia Awards 2023. Penghargaan dalam Kategori *Prominent Figure in Cybercrime Eradication* itu merupakan apresiasi atas keberanian dan ketegasan dalam menindak kejahatan di dunia maya, salah satunya judi *online*.

"Ini kan bagian bentuk dari apresiasi CNBC sebagai ekosistem media untuk mendorong terus perubahan, keberanian, dan inovasi baru di semua bidang," ujarnya dalam *CNBC Indonesia Award 2023: Maintaining Optimism Amid Uncertainty* di The Westin Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023) malam.

Sejak dilantik menjadi Menteri Kominfo pada tanggal 17 Juli 2023, Budi Arie Setiadi langsung bergerak cepat. Sejak 18 Juli s.d. 11 Oktober 2023, Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinannya melakukan pemutusan akses terhadap 392.652 konten perjudian dari seluruh ruang digital yang terdiri dari 205.910 konten dalam situs, 16.304 konten *file sharing*, dan 170.438 konten media sosial.

Menurut Menkominfo, tindakan tersebut diambil sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.



Menteri Budi Arie mengapresiasi dan berterima kasih kepada penyelenggara layanan operator seluler yang memberikan dukungan penuh dalam memerangi judi *online*.

"Jadi tanpa (operator seluler) paling Indonesia tidak mungkin terwujud," ungkapnya

CNBC Indonesia Awards 2023 merupakan ajang penghargaan kepada para pelaku di berbagai industri yang berhasil beradaptasi dan terus tumbuh di tengah tantangan dan berbagai

kondisi yang terjadi. Menkominfo menerima penghargaan langsung dari *Chairman CT Corp Chairul Tanjung*.

"Terima kasih Pak CT," ungkapnya.

Dalam acara itu, hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, *Founder dan Chairman CT Corp Chairul Tanjung*, *Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo*, *Pendiri Bayan Resources Dato Low Tuck Kwong* dan pemenang *CNBC Awards Indonesia 2023*.



# 392.652

Akses konten perjudian  
diputus sejak dilantik

## DLA Summit 2023, Komitmen Kominfo Kembangkan SDM Digital



Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya meningkatkan jumlah, kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia digital. Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan hal itu merupakan bagian dari upaya akselerasi transformasi digital nasional.

"Kami menjalankan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh lembaga dan organisasi yang ada di Indonesia harus melaksanakan akselerasi transformasi digital," ungkapnya dalam *Digital Leader Academy (DLA) Summit 2023* di Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Kepala BPSDM Hary Budiarto menyatakan lewat Pelatihan DLA, Kementerian Kominfo melatih SDM di level pimpinan lembaga untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring kegiatan atau program. Selain itu, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pimpinan agar mampu mengubah pola pikir dan mendorong kesamaan persepsi dan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi digital.

"Akselerasi transformasi digital adalah perubahan *mindset* atau pola pikir atau pola tindak untuk selalu menerapkan yang dinamakan efisiensi

transparansi dan akuntabilitas serta bebas korupsi dalam melaksanakan kegiatan dan program sehari-hari," tandasnya.

Menurut Kepala BPSDM Kementerian Kominfo, salah satu kunci keberhasilan transformasi digital nasional adalah berkembangnya ekosistem digital dengan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, pelatihan DLA juga memfasilitasi perumusan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tadi ada lima atau enam rencana aksi yang dipresentasikan yaitu rencana aksi yang terbaik. Silahkan untuk diimplementasikan dibuat suatu proyek manajemen," ujarnya seraya berharap bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara.

Hary Budiarto menyatakan penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Digital merupakan bagian dari pelaksanaan Visi Indonesia Digital (VID) 2045. Menurutnya, salah satu visi yang telah ditetapkan Kementerian Kominfo bisa mewujudkan masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya maka dengan bersinergi dan berkolaborasi.

"Saya berharap agar DLA Summit 2023 dapat mewujudkan pengembangan masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya sesuai dengan visi Indonesia Digital 2045," ungkapnya.

Selama tahun 2023, pelatihan DLA sudah diikuti oleh 300 orang peserta dari sektor publik dan privat. Kementerian Kominfo melibatkan perguruan tinggi ternama yaitu University of Oxford - UK, University of Strathclyde Glasgow - UK, Cambridge University - US, University of Wollongong - Australia, University of Twente - Belanda. Selain itu, BPSD Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan organisasi UNDP, UN-APCICT dan JICA Japan serta dua global *technology company* Amazon Web Service (AWS) dan Google.

## Kembangkan Ekosistem Industri Gim, Kominfo Hadirkan Kebijakan Afirmatif



Pertumbuhan gim daring terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Reedser Analysis, pada tahun 2023, lebih dari 70 persen penduduk Indonesia terpapar gim yang disediakan dalam berbagai perangkat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan dukungan untuk pengembangan ekosistem gim Indonesia melalui kebijakan afirmatif.

"Kementerian Kominfo berupaya menghadirkan kebijakan afirmatif bagi ekosistem *game* Indonesia," ujarnya dalam acara penandatanganan MoU Pengembangan *e-Sports* Desa Kreatif - *Weekly Brief* Menparekraf, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Menurut Menteri Budi Arie Setiadi, pada tahun 2022, pengguna gim di Indonesia telah mengunduh 3,45 miliar gim daring. Kondisi itu menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua negara dengan pengguna gim daring terbanyak di dunia.

Mengutip data *State of Mobile Gaming 2023* dan Statista *Market Insight 2023*, Menkominfo menyatakan pertumbuhan tersebut diperkirakan terus melaju positif. Pada tahun 2028, diproyeksikan terdapat 45,5 juta pengguna di pasar game online Indonesia dengan estimasi pendapatan bernilai sebesar USD491.10 Juta atau hampir Rp6 Triliun.

“...Indonesia sebagai peringkat kedua negara dengan pengguna gim daring terbanyak di dunia



"Potensi ekonomi yang signifikan tersebut tentu harus kita kembangkan secara serius," tandasnya.

Salah satu dukungan nyata Kementerian Kominfo dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Revisi ini merupakan bagian dari penyusunan Perpres tentang Industri Gim Nasional yang bertujuan memperkuat industri gim lokal

"Secara prinsip dapat menghadirkan *level playing field* antara pelaku industri gim lokal dan global," tegas Menteri Budi Arie.

Selain itu, Kementerian Kominfo bersama Asosiasi Game Indonesia (AGI) juga mendorong pertumbuhan usaha pelaku gim Indonesia melalui *Indonesia Game Developer Exchange* (IDGX). Kegiatan IDGX terdiri dari kegiatan *game developer mentoring*, *business matchmaking* dan pertukaran informasi melalui berbagai *workshop* dan diskusi bersama pelaku industri global.

"Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dan nilai produk bagi pengembangan *game* di Indonesia," ungkap Menkominfo.

“...Semoga ke depan semakin banyak talenta digital Indonesia di bidang game”

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengapresiasi inisiatif pengembangan ekosistem gim daring di Desa Kreatif Indonesia yang diperkuat melalui penandatanganan MoU.

"Semoga ke depan semakin banyak talenta digital Indonesia di bidang *game* yang kreatif, unggul, yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global," harapnya.

Dalam acara itu hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Dewan Pembina Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI) Sandiaga Uno, Staf Khusus Presiden RI sekaligus Dewan Pembina IESPA Diaz Hendropriyono, Ketua Umum ADKI Fikri El-Aziz, dan Ketua Umum IESPA Ibnu Riza.

## Fasilitasi Mudik Nataru, Kominfo Bentuk Tim Komunikasi Publik



Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan strategi komunikasi publik untuk mendukung rangkaian mudik perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun baru 2024 (Nataru) berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyatakan Kementerian Kominfo bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus.

"Jadi, kita sudah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan sebagai *leading sector*-nya, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, BMKG, Korlantas Polri, serta pemerintah daerah," ungkapnya dalam Konferensi Pers Persiapan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di *Press Room* Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Menurut Dirjen Usman Kansong, keberadaan tim lintas kementerian dan lembaga ini guna mendukung kelancaran masyarakat yang hendak berlibur atau merayakan Nataru.

"Nantinya, tim ini akan memproduksi konten-konten dan mendiseminasikan informasinya yang berisi ajakan agar kita bisa melaksanakan liburan Natal dan Tahun Baru secara tertib dan aman,"

Selaras dengan Kampanye Nataru 2023/2034 Transportasi Aman, Liburan Nyaman. Dirjen IKP Kementerian Kominfo mengarahkan tim untuk memproduksi dan mendiseminasikan konten berisi ajakan tertib berlalu lintas selama liburan natal dan tahun baru.

"Karena sifatnya *living document*, situasi dan kondisi lalu lintas selama periode tersebut akan terus di *update* oleh tim ini," ungkapnya.

Bahkan, Kementerian Kominfo telah memproduksi buku elektronik Panduan Natal dan Tahun Baru. Menurut Dirjen Usman Kansong, panduan ini memuat informasi yang dibutuhkan pemudik mulai dari ketersediaan moda transportasi, daerah tujuan perjalanan Nataru, dan informasi penting lain termasuk tautan akses bersama dengan CCTV Jasa Marga.

"Masyarakat bisa menjadikan buku ini sebagai panduan. Di dalam buku ini juga tersedia informasi seperti lokasi istirahat dan sebagainya. Hadirnya buku elektronik ini menjadi serasa menikmati libur nataru. Jadi, dengan mengakses buku ini kita bisa tahu mana daerah yang barangkali macet begitu, mana yang lancar. Kita menyebutnya Mudikpedia Nataru, yang bisa diakses melalui laman <https://s.id/mudikpedia>," tuturnya.

## Menkominfo: Semangat Bela Negara Jadikan Masyarakat Cerdas dan Tangguh



Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menekankan arti penting masyarakat memiliki jiwa Bela Negara sebagai pilar utama dalam menghadapi situasi dan tantangan yang ada saat ini. Menurutnya, tantangan ke depan ini semakin tidak terduga.

"Bukan hanya ancaman fisik, kita juga menghadapi ancaman tak kasat mata yang membawa dampak dan risiko ketahanan negara. Kita harus memiliki jiwa Bela Negara yang menjadikan kita tangguh, cerdas dalam menghadapi situasi tak menentu tersebut," ujarnya saat membacakan Amanat Presiden Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-75 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Menurut Menkominfo, semangat Bela Negara menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. "Semangat Bela Negara butuh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan. Ini tugas kita bersama, menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.

Menteri Budi Arie menjelaskan, Bela Negara tidak hanya tindakan yang berkaitan dengan aspek militer, namun merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Setiap tindakan, sekecil apapun, yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta Pancasila dan NKRI, adalah wujud konkrit Bela Negara. Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk mengobarkan semangat Bela Negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air," tandasnya.

Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-75 juga dihadiri Wamenkominfo Nezar Patria, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta perwakilan sivitas Kementerian Kominfo.

## Menteri Budi Arie Rinci Capaian Kinerja Ditjen PPI



“  
...Ditjen PPI berperan penting untuk mewujudkan transformasi digital dalam pengajaran penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menkominfo Budi Arie Setiadi juga menyebutkan sejumlah capaian kerja juga memberikan bukti nyata kontribusi Ditjen PPI Kementerian Kominfo dalam transformasi digital nasional.

"Hasil evaluasi yang memuaskan dengan nilai A. Selain itu, beberapa unit di bawah Ditjen PPI juga mendapat Predikat Berprestasi dalam Reformasi Birokrasi 2023," ujarnya dalam acara InterAKSI: Indonesia Terkoneksi dan Siap Beraksi di Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Menurut Menteri Budi Arie Ditjen PPI berperan penting untuk mewujudkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran.

"Ditjen PPI berperan penting untuk mewujudkan transformasi digital dalam pengajaran penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran," tegasnya.

Menkominfo mengidentifikasi beberapa capaian pelaksanaan tugas Ditjen PPI. Pertama perluasan jangkauan sinyal 4G yang mencapai 96,48% sampai dengan akhir kuartal 4 Tahun 2022.



Selanjutnya layanan panggilan darurat 112 telah diterapkan oleh 127 pemerintah daerah kabupaten dan kota. Ketiga, Ditjen PPI berhasil melaksanakan *Analogue Switch Off (ASO)*, dan keempat membagikan *set top box (STB)* kepada 1,35 juta rumah tangga miskin.

Dalam hal pelayanan, Ditjen PPI mendapatkan sertifikasi ISO dalam Manajemen Mutu Perizinan, serta dalam Implementasi Sistem Manajemen Keamanan dan Informasi.

"Capaian luar biasa tersebut dibuktikan juga dengan penghargaan yang diterima Ditjen PPI," tegas Menteri Budi Arie.

Sejarah pembentukan Ditjen PPI merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kominfo No. 17 Tahun 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kominfo.

"Peraturan tersebut mendorong perubahan struktur yang meliputi, Pemekaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjadi dua direktorat jenderal, yaitu Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI), dan Ditjen PPI," tutur Menkominfo.

Dengan adanya perubahan itu, saat ini Ditjen PPI Kementerian Kominfo memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan

"Dengan fungsi antara lain, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, hingga evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika," tutur Menteri Budi Arie.

“ Dalam hal pelayanan, Ditjen PPI mendapatkan sertifikasi ISO dalam Manajemen Mutu Perizinan, serta dalam Implementasi Sistem Manajemen Keamanan dan Informasi

## Kunjungi Balmon Manado, Menteri Budi Arie: Semangat dan Bekerja Keras!

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta pegawai di Unit Pelayanan Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tetap bersemangat dan bekerja keras untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan menjaga spektrum frekuensi radio aman dari gangguan.

"Mudah-mudahan teman-teman Balmon tetap semangat, tetap bekerja keras bersama-sama," ungkapnya dalam kunjungan ke kantor Balmon SFR Kelas II Manado di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (29/12/2023).



Menurut Menkominfo, keberadaan Balmon SFR Kelas II Manado penting untuk menyatukan negeri terutama untuk memaksimalkan konektivitas di daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Menteri Budi Arie juga mengingatkan pegawai Balmon SFR Kelas II Manado untuk mendukung Kampanye Pemilu Damai. Menurutnya hal itu dilakukan dengan menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal.

“ ...keberadaan Balmon SFR Kelas II Manado penting untuk menyatukan negeri



Menkominfo mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bagi pegawai BalmonSFR Kelas II Manado. Menteri Budi Arie berharap di Tahun 2024, seluruh sivitas Kementerian Kominfo dapat lebih bersemangat, berkinerja optimal, inovatif, dan maju.

"Semoga tahun baru kita bisa lebih semangat, lebih optimal, lebih inovatif, dan bisa lebih maju," ujarnya.

Dalam acara kunjungan ini Menkominfo didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, serta staf ahli dan staf khusus menteri.



## BTS 4G Dukung Pengamanan Pos Lintas Batas Negeri



Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menuntaskan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi salah satu titik lokasi prioritas pembangunan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan penyediaan konektivitas telekomunikasi, khususnya di PLBN mendukung Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga keamanan negara.

"Keberadaan BTS 4G sangat penting untuk meningkatkan konektivitas internet di pelosok negeri, terutama daerah 3T," ujarnya di Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2023).

Menteri Budi Arie menyatakan salah satu pemanfaatan BTS 4G yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo untuk mendukung pertahanan negara.

"Kominfo telah bekerja sama dan berupaya memberikan dukungan penuh kepada TNI yang menjalankan tugas pengamanan daerah perbatasan," tandasnya.

Menurut Menkominfo penyediaan infrastruktur BTS 4G di daerah 3T per tanggal 10 Desember 2023 tercapai 6.025 lokasi yang telah *on air*. BAKTI Kementerian Kominfo juga menargetkan akan ada penambahan lokasi *on air* sebanyak 645 lokasi baru per 31 Desember 2023.

BTS ON AIR

6.025 Lokasi  
BTS 4G di daerah 3T

Per 10 Des 2023



**...Keberadaan PLBN Long Nawang memiliki arti strategis dalam mencegah peredaran narkoba dan perlintasan ilegal**

"Dari 645 lokasi, 123 lokasi diantaranya, tergantung pada kondisi keamanan dan ketersediaan *spare parts*, sehingga target lokasi *on air* 2023 adalah 6.547 lokasi," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam Peresmian Pengoperasian BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo dan Integrasi SATRIA-1 dengan stasiun bumi di Desa Bowombaru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023), Presiden Joko Widodo melakukan konferensi video dengan Komandan Pleton PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui konferensi video dengan jaringan BTS 4G, Dimas Aryadi Darmawan menyatakan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas pembangunan BTS 4G. Dimas berharap cakupan layanan internet di daerahnya dapat diperluas.

"Saat ini kami Pos Long Nawang dapat menggunakan fasilitas internet dan telah menunjang tugas kami di wilayah perbatasan," tuturnya.

PLBN Long Nawang berada di pedalaman pegunungan Long Nawang yang berbatasan langsung dengan Long Busang di Sarawak, Malaysia. PLBN berkategori darat ini juga akrab dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Tapak Mega.

"Harapan kami untuk cakupan layanan fasilitas internet dapat diperluas, sehingga dapat digunakan di seluruh pos di wilayah perbatasan untuk kepentingan pertahanan negara," lanjutnya.

Keberadaan PLBN Long Nawang memiliki arti strategis dalam mencegah peredaran narkoba dan perlintasan ilegal, serta dapat mendukung perdagangan lintas batas negara yang menguntungkan masyarakat perbatasan.

"Layanan internet dapat kami manfaatkan karena berguna dan dapat mempercepat penyampaian informasi sekaligus menunjang di bidang pendidikan," jelas Dimas Aryadi.

## Balmon Denpasar Musnahkan Alat Telekomunikasi Ilegal



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar melaksanakan pemusnahan 35 unit alat telekomunikasi di Kantor Balmon Denpasar, Senin (4/12/2023). Pemusnahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil temuan saat penertiban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan SFR dan alat telekomunikasi periode 2019-2023.

Pemusnahan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (penetapan Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang cipta kerja) beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah 46 tahun 2021. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Dirjen SDPPI nomor 7 tahun 2021 yang mengatur sanksi administratif terkait alat telekomunikasi.

Direktur Pengendalian SDPPI, Sabirin Mochtar melalui sambutannya menekankan bahwa pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dapat berdampak buruk terhadap pengguna berizin dan keselamatan jiwa, terutama jika mengganggu frekuensi penerbangan, kebencanaan, BMKG, atau obyek vital lainnya.

"Pelanggaran ini dapat menyebabkan gangguan tanpa disadari oleh para pengguna, sehingga menciptakan *spurious* pada frekuensi lain," terangnya.

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar, Zainullah Manan, mengungkapkan bahwa Balmon Denpasar senantiasa terus melakukan pengawasan dan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio (SFR) tiap tahunnya demi menjaga kenyamanan



**...pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dapat berdampak buruk terhadap pengguna berizin dan keselamatan jiwa**



## Ditjen SDPPI Apresiasi Sistem IMEI Self-Registration untuk Wisatawan Asing oleh Telkom

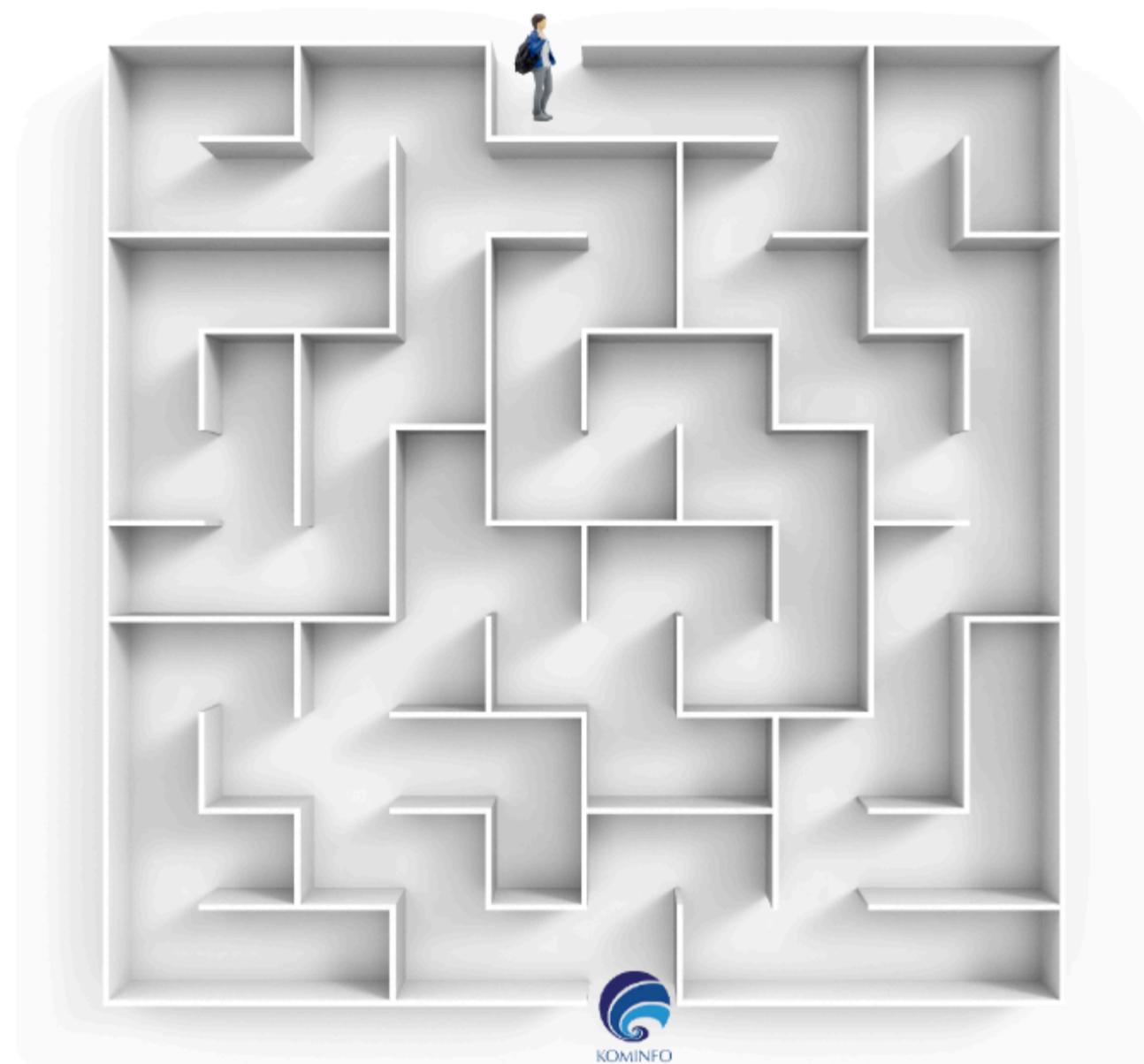
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan apresiasi terhadap inovasi terbaru sistem IMEI *Self-Registration* yang diperkenalkan oleh Telkom untuk mempermudah dan mempercepat proses registrasi IMEI perangkat telekomunikasi bagi para wisatawan asing.

Registrasi IMEI perangkat telekomunikasi untuk turis asing selama ini dilaksanakan melalui kanal registrasi yang disediakan oleh Operator Seluler. Layanan registrasi ini tersedia di masing-masing gerai operator seluler. Dalam menghadapi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pasca pandemi Covid-19,

"Kami mengapresiasi pelaksanaan *Live Demo* yang diselenggarakan oleh PT Telkom sebagai wujud inisiatif operator seluler dalam mempermudah pelanggan seluler terutama wisatawan dalam mendukung program kegiatan pengendalian IMEI nasional yang dilakukan oleh pemerintah." ujar Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Mulyadi, Jumat (15/12/2023).

Direktorat Jenderal SDPPI turut menyaksikan Live Demo Registrasi IMEI Pelanggan WNA *Self-Registration* atau Registrasi IMEI dengan jalur tanpa melalui *customer service* operator seluler yang diselenggarakan oleh PT Telkom di Graha Merah Putih (Telkom Indonesia) Jakarta.

“...mempermudah pelanggan seluler terutama wisatawan dalam mendukung program kegiatan pengendalian IMEI nasional”



## Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

### Ikuti Sosial Media Kominfo

- @Kemenkominfo
- @kemkominfo
- Kemkominfo
- Kemkominfo TV
- @kemkominfo

### Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- KominfoPedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment



Selamat Merayakan  
**HARI NATAL**

*25 Desember 2023*

"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya."

**Lukas 2:14**



**Bapak Budi Arie Setiadi & Ibu Dina Budi Arie**